**KAJIAN HUKUM DUALISME KEWENANGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM
TINDAK PIDANA PERIKANAN SETELAH DITETAPKAN- NYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN**

**Oleh : Abdi Afriando
Pembimbing I :Dr. Zulfikar Jayakusuma, SH.,MH.
Pembimbing II :Dr. Mukhlis R, SH.,MH.
Alamat: Jl. Kampung Baru Perum. BMP 1 Blok J. 37
Email/Telepon : 082277675325**

ABSTRACT

The existence of Indonesia as one of the largest archipelagic countries in the world is a gift from God Almighty who created and is also the owner of the universe. On the third issue requires the establishment of fisheries courts throughout the territory of the Republic of Indonesia fisheries management. In this case the implementation of law enforcement in the fisheries sector becomes very important and strategic in order to support fisheries development. The spirit of the formation of this special justice is also based on the spirit to overcome the crisis of "powerlessness" of the existing justice institutions in responding to various legal issues, especially those related to law enforcement of fisheries criminal acts.

The type of research or approach used by the author is normative legal research. Normative legal research is library legal research, in this normative legal research the authors conduct research on legal principles, namely the principle of justice which is simple, fast and low cost. Where the author is guided by the provisions in force. The data source used by the author in this study is secondary data.

Settlement of fisheries cases according to Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries in court after the investigation files have been submitted by investigators in the field to be transferred to the prosecutor begins since the investigation case files are declared complete, with a maximum time limit of 30 days the public prosecutor submits the case to district court (Article 76 paragraph (9) of the Fisheries Law). By observing that the suspect can only be detained for a maximum of 20 days and the maximum time limit for the prosecution is 30 days, it seems that the public prosecutor in processing the prosecution of fisheries cases has a choice, will use the detention time or the time limit for the prosecution to settle the case. The problem that arises then is when a region that does not have a fisheries court must resolve the problem of fisheries criminal acts through a district court.

Settlement of fisheries criminal cases in Indonesia as regulated in Act Number 45 of 2009 concerning Fisheries which states that fisheries court is a special court established to resolve criminal offenses in the field of fisheries.

Keywords: Fisheries Court, Investigations, Fisheries Crimes.

PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Negara Indonesia sebagai salah satu Negara kepulauan terbesar di dunia merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan dan sekaligus pemilik alam jagad raya. Sebagai Negara kepulauan sebagian besar wilayah Negara Republik Indonesia terdiri atas 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km² dan luas sekitar 3.1 juta km² yang dimana 2/3 wilayahnya adalah perairan yang terdiri atas laut pesisir, laut lepas, teluk, dan selat, memiliki panjang pantai 95.181 km². Dengan luas perairan 5,8 juta km², yang kaya akan sumber daya laut dan ikan. Luas perairan 5,8 juta km² tersebut terdiri atas:¹

1. Perairan laut teritorial 0,3 juta km²,
2. Perairan nusantara 2,8 juta km², dan
3. Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 juta km².

Terkait penanganan permasalahan tindak pidana di bidang perikanan, dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, ada beberapa isu yang menjadi fokus utama dalam perubahannya yaitu:²

1. Mengenai pengawasan dan penegakan hukum yang menyangkut masalah mekanisme koordinasi antar instansi penyidik dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan, penerapan sanksi (pidana atau denda) hukum acara, terutama mengenai penentuan batas waktu pemeriksaan perkara, dan fasilitas dalam penegakan hukum di bidang perikanan, termasuk kemungkinan penerapan tindakan hukum berupa penenggelaman kapal asing yang

beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

2. Masalah pengelolaan perikanan antara lain pelabuhan perikanan, konservasi, perizinan dan kesyahbandaraan.
3. Mengenai perluasan yurisdiksi pengadilan perikanan sehingga mencakup seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Kewenangan mengadili atau kompetensi yurisdiksi pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya.³ Pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan bahwa pengadilan perikanan merupakan pengadilan khusus yang mengamanatkan bahwa kasus-kasus perikanan mesti masuk ke pengadilan perikanan, namun ternyata implementasi dilapangan baru dapat terealisasi pada tahun 2012. Dengan kata lain, dalam penanganan tindak pidana perikanan adanya kasus yang diadili, diperiksa, dan diputus baik itu di pengadilan negeri yang berwenang dan di pengadilan perikanan.

Dengan adanya pemeriksaan tindak pidana di bidang perikanan yang dilakukan oleh pengadilan perikanan, dan pengadilan negeri, maka ada dualisme kewenangan dalam penanganan tindak pidana perikanan. Dikarenakan terdapat perbedaan antara penanganan perkara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh pengadilan perikanan, yang dimana aparat, sistem, dan proses penanganannya berbeda dengan yang dilaksanakan melalui peradilan umum.⁴ Sehingga penanganan tindak pidana di bidang perikanan pada saat ini belum

¹ Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta:2011, hlm.1-2.

² Penjelasan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hal. 160.

⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengadilan Perikanan*, (Jakarta, 2009). Hlm. 89.

berjalan secara maksimal mengalami berbagai hambatan dalam penyelesaiannya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas mengenai permasalahan yang terjadi dalam upaya penegakan hukum tindak pidana perikanan yang terjadi di Republik Indonesia, maka dari itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Kajian Hukum Dualisme Kewenangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Setelah Ditetapkan-Nya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Perikanan setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan?
2. Bagaimanakah persoalan Hukum yang muncul dengan adanya Dualisme badan peradilan perikanan di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Perikanan setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
 - b. Untuk mengetahui persoalan Hukum yang muncul dengan adanya Dualisme badan peradilan perikanan di Indonesia.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti khususnya mengenai masalah yang diteliti.
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi akademisi, sekaligus bahan perbandingan sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih bermanfaat lagi dan demi pengembangan pengetahuan hukum.
 - c. Bagi Aparat Penegak Hukum, sebagai bahan masukan dan

pertimbangan agar lebih memperhatikan dan dapat menjalankan tugas dan peranannya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Dalam masyarakat manapun, penegakan hukum akan memiliki peran penting dalam upaya masyarakat untuk mengurangi kejahatan.⁵ Simons menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah semua tindakan keharusan (*gebod*) dan larangan (*verbod*) yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya yang diancamkan dengan derita khusus, yaitu pidana.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶ Tujuan daripada penegakan hukum yakni untuk mengatur masyarakat agar damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya.⁷

Makna inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang menjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan

⁵ John N. Gallo, *“Effective Law-Enforcement Techniques For Reducing Crime”*. Journal Of Criminal Law and Criminology, Northwestern University School Of Law, 88 J. Crim. L. & Criminology 1475, Summer 1998.

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 5

⁷ RE. Baringbing, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta, 2001, hlm. 54.

kedamaian pergaulan hidup.⁸

Melaksanakan penegakan hukum yang selaras dengan pembangunan bukanlah sesuatu yang mudah dan merupakan permasalahan manusia yang kompleks sebagai suatu kenyataan sosial. Sehubungan dengan ini ingin dikemukakan beberapa masalah yang dapat merupakan pendukung dan penghambat penegakan hukum yang rasional, serta tanggung jawab dan bermanfaat yang harus ditanggulangi bersama. Adapun masalah yang bersangkutan adalah antara lain sebagai berikut:⁹

1. Pengertian penegakan hukum. Bagi para partisipan dalam usaha penegakan hukum harus jelas terlebih dahulu mengenai yang diartikan dengan penegakan hukum. Oleh karena itu, pengertian yang tidak tepat, dapat mengakibatkan pengambilan sikap dan penentuan tindak yang tidak tepat pula.
2. Penghairan berpartisipasi dalam usaha penegakan hukum. Masalah berpartisipasi ini berhubungan erat dengan masalah-masalah lain, seperti faktor-faktor pendukung dan penghambat berpartisipasi yang berhubungan dengan unsur-unsur politis, ekonomis, sosial, budaya, dan religi yang dapat berpengaruh positif maupun negatif.
3. Pengembangan kemanusiaan antar para partisipan, subjek, dan objek pelaksanaan usaha penegakan hukum. Hal ini perlu mendapatkan perhatian, karena merupakan masalah yang pelik dan peka dalam berpartisipasi dan pelaksanaan penegakan hukum. Masalah ini mutlak harus diperhitungkan untuk mencegah sikap dan tindak dalam usaha penegakan hukum yang tidak berperikemanusiaan dan melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

⁸ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 5.

⁹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm.125-127.

4. Jaminan perlindungan bagi partisipan (mental, fisik dan sosial). Hal ini merupakan masalah utama lain yang perlu mendapatkan perhatian dan diadakan dalam usaha penegakan hukum. Hal ini berhubungan erat dengan sifat, situasi, dan kondisi usaha penegakan hukum tersebut.

2. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana disebut juga sebagai "*Criminal Justice System*" yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga permasyarakatan.¹⁰ Sedangkan Muladi mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan jaringan (*network*) peradilan yang merupakan hukum pidana materil, hukum pidana formil merupakan hukum pelaksana pidana.¹¹

Sistem peradilan pidana adalah suatu penegakan hukum yang didalamnya terkandung aspek hukum yang menitikberatkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum (*certainly*). Sistem peradilan pidana juga dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan *social defend* yang terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitikberatkan kepada penggunaan.¹²

Ciri-ciri pendekatan sistem peradilan pidana:¹³

- a. Titik berat koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, lembaga permasyarakatan, dan penasihat hukum).

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Putra Bardin, Jakarta: 1996, hlm33.

¹¹ Muladi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Citra Baru, Jakarta, 1994, hlm. 30

¹² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Ekstensialisme dan Abolitionisme*, Bina Cipta, Bandung: 1996, hlm 25.

¹³ Oc. Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, PT. Alumni, Bandung:2006, hlm. 31.

- b. Pengawasan dan penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
- c. Efektifitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efektifitas penyelesaian perkara.
- d. Penggunaan hukum sebagai instrument untuk memantapkan administrasi keadilan.

Untuk mengembangkan sistem peradilan pidana ada 2 pendekatan (model) sistem peradilan pidana, yaitu:

1. *Due Process model* dan *Crime Control Model*

Due process model adalah konsep perlindungan hak individu dan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan peradilan pidana.¹⁴ Jadi disini proses kriminal harus dapat dikendalikan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan sifat otoriter. Sedangkan *crime control model* artinya peradilan semata-mata untuk menindas pelaku kriminal dan ini merupakan tujuan utama dari proses peradilan.¹⁵

2. *Family Model* (Model Kekeluargaan)

Model kekeluargaan ini diperkenalkan oleh John Griffiths. Menurut model ini penyelenggaraan peradilan pidana dilakukan dengan cinta kasih sesama mahluk hidup atas dasar kepentingan saling menguntungkan.¹⁶

E. Kerangka Konseptual

1. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan megolah data, keterangan, dan/atau alat bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standard.¹⁷
2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan itu disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan

tersebut.¹⁸

3. Pidana adalah suatu penderitan atau nestapa yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.¹⁹
4. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.²⁰
5. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra-reproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.²¹
6. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
7. Pengadilan Perikanan adalah pengadilan khusus yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus pidana di bidang perikanan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian atau pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan, dalam penelitian hukum

¹⁴ Ansorie Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung:1990,hlm. 9.

¹⁵ *Ibid*,hlm. 6.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 7.

¹⁷<http://walangkopo99.blogspot.com/2012/06/pengertian-pemeriksaan.html?m=1> diakses, 03 Maret 2019, Jam 13.40 WIB.

¹⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 9.

¹⁹ <http://www.pengertianahli.com>, diakses, 04 Maret 2019, Jam 15.00 WIB.

²⁰ Penjelasan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 1 angka 4.

²¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 1 angka 1.

normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yaitu asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Dimana penulis berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikat, yaitu semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Merauke.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²² Terdiri dari :

1. Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum.
2. Kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum dari para ahli.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya:

kamus, ensiklopedi, indeks komulatif, dan sebagainya.²³

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif (*legal research*) digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, Dimana dalam penelitian ini untuk menentukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Dalam penelitian normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis.²⁴ Analisis yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas.²⁵ Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum, dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.²⁶ Menguraikan secara *deskriptif* adalah gambaran mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan hal tersebut.²⁷ Sedangkan sifat penelitian untuk menyelesaikan proposal ini adalah deskriptif analisis yaitu suatu penelitian dengan menggambarkan keadaan yang timbul karena adanya peraturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana di bidang Perikanan di wilayah NKRI.

²³ *Ibid.*

²⁴ Darmini Rosa, "Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara di Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III, 2009, hlm. 71.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Aslim Rasyat, *Metode Ilmiah : Persiapan Bagi Peneliti*, Universitas Riau Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

²⁷ Meilany dan Weni Rahayu, *Ensiklopedi Bahasa Indonesia 1*, PT. Mediantara Semesta, Jakarta, 2012, hlm. 116.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 2011, hlm.13.

I. Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Di Bidang Perikanan.

1. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah istilah paling umum untuk istilah *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Terjemahan atas istilah *strafbaarfeit* ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *strafbaarfeit*.²⁸

Menurut Van Hamel *strafbaarfeit* adalah "kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan." Menurut Hazewinkel Suringa *strafbaarfeit* adalah "Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya."²⁹

Menurut Simons *strafbaarfeit* adalah "Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum."³⁰

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka harus ada rumusan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau

syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:³¹

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
2. Diancam dengan pidana (*statbaargesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Seorang ahli hukum yaitu Simons merumuskan bahwa *strafbaar feit* ialah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum.
- b. Bertentangan dengan hukum.
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah.
- d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

2. Tindak Pidana Di Bidang Perikanan

a. Pengertian Tindak Pidana Perikanan

Tindak pidana di bidang perikanan merupakan tindak pidana diluar KUHP yang diatur menyimpang, karena tindak pidananya dapat menimbulkan kerusakan dalam pengelolaan perikanan Indonesia yang berakibat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara, seperti tindak pidana penangkapan ikan dengan alat yang dilarang, pengeboman ikan, bisnis perikanan

²⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 96-97.

²⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, Cetakan ke-4, hlm. 18.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Skripsi Muh.Faizal Al-Fitrah Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perikanan Dalam Hubungannya Dengan Perizinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 907/Pid.B/2015/Pn.Mks).

ilegal tanpa mempunyai surat perizinan serta masih banyak lagi kasus yang lainnya.

b. Penggolongan Tindak Pidana Perikanan

Jenis dan Sifat Hukuman Pidana Perikanan :

a. Jenis Hukuman Pidana

Dalam Pasal 10 KUHP dikenal ada dua jenis hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok merupakan hukuman yang wajib di jatuhkan hakim yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan sifatnya tidak wajib dijatuhkan hakim, yaitu berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Untuk jenis hukuman pidana di bidang perikanan hanya mengenal pidana pokok, sedangkan pidana tambahan tidak diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perikanan. Mengenai pidana pokok yang dapat dijatuhkan hakim dalam perkara perikanan berupa pidana penjara dan pidana denda. Meskipun Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perikanan tidak mengatur secara khusus pidana tambahan, namun hakim perikanan tetap dapat menjatuhkan pidana tambahan berdasarkan Pasal 10 KUHP tersebut.

b. Sifat Hukuman Pidana

Hukuman pidana di bidang perikanan sebagian besar bersifat kumulatif, baik ditujukan terhadap delik kejahatan maupun delik pelanggaran. Dalam hukuman kumulatif pidana badan (penjara) dengan pidana denda diterapkan sekaligus. Disini tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan kedua pidana tersebut, juga hakim tidak dapat memilih salah satu hukuman untuk dijatuhkan, melainkan wajib menjatuhkan pidana pokok kedua-duanya.

Hukuman yang berupa pidana penjara yang tinggi dan pidana denda yang berat terhadap pelaku pidana perikanan dengan

tujuan agar menimbulkan efek jera. Pelaku yang terbukti bersalah selain wajib menjalani pidana penjara bertahun-tahun, juga wajib membayar denda kepada negara yang nilainya tidak sedikit

B. Tinjauan Umum tentang Peradilan Perikanan.

Pembentukan Pengadilan Perikanan merupakan amanah Pasal 71 Undnag-Undang Nomo 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dengan kata lain, dibentuknya pengadilan perikanan dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan. Dalam hal ini pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan.³² Kedudukan dari pengadilan Perikanan merupakan pengadilan khusus yang berada dibawah lingkungan pengadilan negeri.³³ Sebagai salah satu pengadilan khusus, Pengadilan Perikanan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan tindak pidana di bidang perikanan sebagai pengadilan secara khusus di bidang perikanan yang berada dalam lingkungan peradilan umum.³⁴

Dalam proses penegakan hukum dapat melengkapi dan menyempurnakan hukum acara dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan (di samping mengikuti hukum acara dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, juga memuat hukum acara khusus). Selain itu, menjamin hukum materiil dan hukum acara (formil) bersifat lebih cepat dan meningkatkan efisiensi dan

³² Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pengadilan Perikanan* (Jakarta, 2009). Hlm. 89

³³ Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009.

³⁴ Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009.

efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan.

a. Substansi Hukum

Dalam pembentukan peradilan perikanan, pada awalnya dasar hukum lahirnya pengadilan perikanan pada Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 pada Pasal 71 yang menyatakan bahwa “Dengan undang-undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana di bidang perikanan”. Namun dalam ketentuan ini, pengaturan suatu kelembagaan pengadilan perikanan hanya diatur dalam 1 (satu) pasal saja. Perubahan ketentuan dari yang sebelumnya menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 menyatakan peraturan mengenai pengadilan perikanan ditambah 1 pasal yaitu Pasal 71A sehingga secara keluruhan dalam pengaturan tentang pengadilan perikanan hanya diatur di dalam 2 pasal saja.

Mengacu kepada berbagai pengadilan khusus yang ada, pengaturan tentang pengadilan khusus tersebut diatur dalam ketentuan yang secara khusus juga. Hal itu dapat dilihat dari Pengadilan Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, Pengadilan Hak Asasi Manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Pengadilan Pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002, Pengadilan Hubungan Industrial diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.

Dengan demikian, perlunya suatu reformasi di pengadilan perikanan dalam substansi hukum (produk hukum) harus dilaksanakan sebagaimana pengaturan yang mengatur secara khusus seperti ipengadilan-pengadilan khusus lainnya. Sehingga dengan adanya pengaturan secara khusus terhadap pengadilan perikanan diluar ketentuan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, memberikan penegasan dan kedudukan yang konsisten bagi pengadilan perikanan dalam menyelesaikan segala permasalahan tindak pidana di bidang perikanan.

b. Kelembagaan Peradilan

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, menyatakan diperlukan perluasan yurisdiksi pengadilan perikanan sehingga mencakup seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Kemudian diatur pula bahwa pembentukan pengadilan perikanan dilakukan dan diterapkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan melalui keputusan Presiden.

Pembentukan pengadilan perikanan masih belum merata diseluruh wilayah pengadilan negeri. Pembentukan peradilan perikanan pertama kali adalah di wilayah Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Tual, Pengadilan Negeri Bitung. Selanjutnya pada tahun 2010, dibentuk dua peradilan perikanan di wilayah Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dan Pengadilan Ranai.⁷¹ Pembentukan peradilan perikanan yang selanjutnya pada tahun 2014 di wilayah Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong, Pengadilan Negeri Merauke.³⁵

c. Aparat Penegak Hukum

Adapun Perkara Perikanan yang disidangkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Perikanan terdiri atas karir dan dua hakim *ad hoc* perikanan. Keberadaan Hakim-hakim *ad hoc* pada peradilan perikanan yaitu untuk menunjang pemeriksaan sidang tindak pidana perikanan yang dikarenakan hakim *ad hoc* yang

³⁵ Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong, dan Pengadilan Negeri Merauke.

memiliki kemampuan dan pengetahuan khusus dalam bidang perikanan. Hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang. Disamping itu, ada Majelis Kehormatan Hakim Majelis yang memeriksa dan menerima pengajuan pembelaan diri dari Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri, serta memberikan pertimbangan, pendapat dan saran atas pembelaan diri tersebut.

Calon Hakim *Ad Hoc* yang dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden untuk diangkat sebagai Hakim *Ad Hoc*. Masa tugas Hakim *Ad Hoc* untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas. Penempatan Hakim *Ad Hoc* ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung.

II. Pembahasan

A. Pelaksanaan Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Perikanan setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Dalam Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menetapkan bahwa:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.”

Penyelesaian perkara perikanan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di pengadilan setelah berkas penyelidikan telah diserahkan oleh penyidik di lapangan untuk dilimpahkan ke penuntut umum dimulai sejak berkas perkara penyidikan dinyatakan sudah lengkap, dengan batas waktu paling lama 30 hari penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri (Pasal 76 ayat

(9) Undang-Undang Perikanan). Dengan memperhatikan tersangka hanya dapat ditahan maksimal 20 hari dan batas waktu penuntutan tersebut maksimal 30 hari, tampaknya penuntut umum di dalam memproses penuntutan perkara perikanan mempunyai pilihan, akan menggunakan waktu penahanan atau batas waktu penuntutan tersebut untuk penyelesaian perkara.³⁶ Apabila yang dipilih menggunakan batas waktu penuntutan 30 hari, perlu kiranya mempertimbangkan batas waktu tersebut sudah termasuk di dalamnya masa penahanan 20 hari, sehingga kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan demi hukum, perkaranya baru dilimpahkan ke pengadilan.

Hal itu mengandung risiko, tersangka akan melarikan diri dan mengalami kesulitan untuk dihadirkan ke persidangan pengadilan. Sebaliknya jika penuntut umum menggunakan masa penahanan yang digunakan untuk melakukan penuntutan, memang tidak mengandung risiko karena pada umumnya perkara pidana dilimpahkan ke pengadilan sebelum masa tahanan tersangka berakhir. Konsekuensinya penuntut umum harus dapat bekerja cepat untuk membuat surat dakwaan untuk kepentingan pelimpahan perkara ke pengadilan.

Terkait jangka waktu penanganan perkara pada pengadilan perikanan waktu yang diberikan sangat singkat dibandingkan dengan jangka waktu pada pengadilan negeri. Jangka waktu penanganan perkara di pengadilan perikanan paling lama yaitu 20 hari dan hanya dapat diperpanjang 10 hari, sementara pada pengadilan negeri jangka waktu penanganan perkara paling lama yaitu 30 hari dan dapat diperpanjang untuk paling lama 60 hari. Dalam proses penyelesaian perkara pidana perikanan di pengadilan

³⁶ H. Djoko Tribuwono, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti Bandung 2013, hal. 2.

mengenai waktu penyelesaian perkara khususnya tidak pidana yang terjadi di perairan ZEE Indonesia oleh nelayan asing berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) hari akibat Jaksa Penuntut Umum terlambat menyampaikan tuntutan. Di tingkat penuntutan, penuntutan terhadap tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh penuntut umum yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perikanan. Jangka waktu pemberkasan perkara pidana perikanan di tingkat penuntutan dibatasi paling lama 30 (tiga puluh) hari harus sudah disampaikan ke tingkat pengadilan, , sejak berkas perkara tersebut diterima lengkap dari penyidik. Akan tetapi ketentuan dalam Pasal 76 ayat (9) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 terkait penyampaian berkas penuntutan yang harus disampaikan oleh penuntut umum kepada ketua pengadilan negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan berkas dari penyidik dinyatakan lengkap, tidak sesuai dengan KUHAP. Kendala teknis lainnya adalah kesulitan komunikasi di sidang pengadilan terkait nelayan asing yang umumnya hanya dapat berkomunikasi menggunakan bahasa daerah asalnya sehingga proses pemeriksaan di pengadilan sangat tergantung penerjemah. . Secara umum cukup sulit mendapatkan penerjemah yang memahami bahasa daerah nelayan asing tersebut.

Pengadilan perikanan sebagai pengadilan khusus berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Perikanan dibentuk di lingkungan peradilan umum, tepatnya berada dalam pengadilan negeri. Pada prinsipnya di setiap pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi wilayah pengolahan perikanan dapat dibentuk pengadilan perikanan dan pembentukannya dilakukan secara bertahap.

Penanggulangan kejahatan di bidang perikanan terlihat Negara baru melaksanakan sebagian yaitu untuk kepentingan penanggulangan pelanggaran

yang terjadi wilayah pengelolaan perikanan yang berada di lautan, sedangkan pengelolaan perikanan yang wilayahnya meliputi sungai, danau dan tambak tampaknya belum ada kehendak untuk mendirikan pengadilan perikanan yang wilayah hukumnya tidak memiliki lautan, padahal ini juga tidak kalah pentingnya untuk dapat meraih pengelolaan perikanan yang lebih baik.

B. Persoalan Hukum yang muncul dengan adanya Dualisme badan peradilan perikanan di Indonesia.

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia dijalankan oleh Mahkamah Agung bersama badan- badan peradilan yang dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Agung, dilakukan melalui badan-badan peradilan yang berada dalam lingkungan dibawahnya yaitu lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Dalam perkembangannya, lembaga peradilan terus mengalami perkembangan dan menjadi beraneka ragam. Perkembangan tersebut terlihat dari adanya pengadilan khusus³⁷ yang dikembangkan di dalam lingkungan pengadilan umum, seperti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Perikanan.³⁸ Sebagai salah satu pengadilan khusus, Pengadilan Perikanan berwenang

³⁷ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³⁸ Jimly Asshiddiqie, "*Pengadilan Khusus,*" in *Putih Hitam Pengadilan Khusus* (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2013).Hlm. 4.

untuk mengadili dan memutuskan tindak pidana secara khusus di bidang perikanan.³⁹ Kedudukan dari pengadilan perikanan merupakan pengadilan khusus yang berada dibawah lingkungan pengadilan negeri.⁴⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyatakan bahwa Pengadilan Perikanan merupakan pengadilan khusus yang mengamanatkan bahwa kasus-kasus dibidang perikanan mesti masuk dan diadili oleh pengadilan perikanan. Namun, kenyataan dilapangan tidak berjalan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Hal ini dikarenakan adanya tindak pidana perikanan yang diadili, diperiksa, dan diputus baik itu di pengadilan negeri yang berwenang dan di pengadilan perikanan.

Berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung dan data dari Badan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung tercatat ada beberapa kasus tindak pidana perikanan yang disidangkan di seluruh Pengadilan Negeri. Pada tahun 2014 total perkara perkara yang masuk sebanyak 84 perkara tindak pidana perikanan, dimana sebanyak 54 perkara tindak pidana perikanan telah diputus, sementara 8 perkara lainnya belum diputus. Pada tahun 2015 total perkara yang masuk sebanyak 183 perkara tindak pidana perikanan, 155 perkara tindak pidana perikanan telah diputus, sementara 28 perkara lainnya belum diputus. Pada tahun 2016 total perkara yang masuk sebanyak 587 perkara tindak pidana perikanan, 507 perkara tindak pidana perikanan telah diputus, sementara 80 perkara belum diputus. Pada tahun 2017 total perkara yang masuk sebanyak 692 perkara tindak pidana perikanan, 633 perkara tindak pidana perikanan telah diputus, sementara 59 perkara belum

diputus. Pada Tahun 2018 total perkara yang masuk sebanyak 587 perkara tindak pidana perikanan, 540 perkara tindak pidana perikanan telah diputus, sementara 47 kasus belum diputus.

Berdasarkan data dari Badan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung tercatat ada beberapa perkara tindak pidana perikanan yang disidangkan di pengadilan perikanan. Pada Tahun 2016 total perkara yang masuk sebanyak 227 perkara tindak pidana perikanan, 166 perkara tindak pidana perikanan telah diputus, sementara 61 perkara belum diputus. Pada Tahun 2017 total perkara yang masuk sebanyak 312 perkara tindak pidana perikanan, 278 perkara tindak pidana perikanan telah diputus, sementara 34 perkara belum diputus. Pada Tahun 2018 total perkara yang masuk sebanyak 261 perkara tindak pidana perikanan, 232 perkara tindak pidana perikanan telah diputus, sementara 29 perkara belum diputus. Pada tahun 2019, hingga Juni 2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan penangkapan kapal *illegal* yang terdiri dari 17 kapal Malaysia, 3 kapal Filipina, dan 32 kapal Indonesia.⁴¹ Pada tahun 2019 berdasarkan data yang diperoleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Badan Karantina, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) sampai dengan Juni 2019 BKIPM telah berhasil menggagalkan 257 kasus penyelundupan benih lobster yang pada umumnya diungkap lewat pintu pemsukan dan pengeluaran wilayah seperti bandara udara dan pelabuhan.⁴²

Berdasarkan data yang dikemukakan tersebut banyak perkara tindak pidana perikanan yang masih diadili di pengadilan negeri dan pengadilan perikanan. Hal ini dikarenakan pengadilan negeri merasa masih

³⁹ Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009.

⁴⁰ Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009.

⁴¹ kkp.go.id

⁴² <https://kkp.go.id/artikel/11774-kkp-catat-kinerja-positif-di-semester-pertama-2019>

memiliki wewenang untuk mengadili perkara tindak pidana perikanan. Hal ini dikarenakan pengadilan perikanan yang merupakan pengadilan khusus yang dibentuk untuk mengadili tindak pidana perikanan berada dibawah peradilan umum yaitu pengadilan negeri.

Dengan adanya pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan di bidang perikanan yang dilakukan oleh pengadilan perikanan dan pengadilan negeri, sehingga menimbulkan adanya dualisme kewenangan antara dua pengadilan ini dalam penanganan tindak pidana perikanan. Permasalahan yang muncul kemudian yaitu ketika daerah yang tidak memiliki peradilan perikanan harus menyelesaikan permasalahan tindak pidana perikanan melalui pengadilan negeri. Sebagaimana diketahui, bahwa dalam memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana perikanan di pengadilan perikanan menggunakan ketentuan hukum acara yang khusus dari ketentuan yang umum pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.⁴³

Pengadilan perikanan merupakan peradilan khusus yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan tindak pidana perikanan. Dalam perkembangannya, ada tindak pidana lain ditemukan dalam kasus tindak pidana di bidang perikanan. Penegak hukum menemukan kejahatan dan pelanggaran lain seperti masalah keimigrasian, perdagangan orang (*human trafficking*), tenaga kerja ilegal, tenaga kerja di bawah umur, pemilikan obat dan senjata ilegal, atau bahkan narkoba. Dalam hal terjadi temuan adanya kasus pidana non perikanan, saat ini tentu dibutuhkan penanganan dan pemeriksaan di peradilan yang berbeda, yakni peradilan umum dan peradilan perikanan.

Seperti salah satu perkara yang terjadi di wilayah perairan batam, yang dimuat dalam Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2018/PN

Btm. Dimana dalam perkara tersebut kapal MV. SUNRISE GLORY yang digunakan para pelaku awalnya diamankan oleh KRI SIGUROT 864 di wilayah perairan batam, dikarenakan kapal MV. SUNRISE GLORY diduga menggunakan dokumen palsu dan dari hasil pemantauan kerap mengganti bendera kapal sesuai dengan negara yang dilewati, dan setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut penyidik menemukan adanya barang terlarang berupa Narkotika golongan I jenis Methampetamina (Shabu).

Mengingat kewenangan Pengadilan Perikanan hanya mencakup tindak pidana bidang perikanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perikanan maka saat ada tindak pidana non perikanan yang ditemukan, pengadilan perikanan tidak memiliki kewenangan untuk menangani perkara non perikanan dan mengharuskan kasus non perikanan ini ditangani oleh peradilan umum.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka yang dapat penulis simpulkan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian perkara tindak pidana perikanan di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang memuat bahwa pengadilan perikanan merupakan peradilan khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan tindak pidana di bidang perikanan belum berjalan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang tersebut, dikarenakan pengadilan perikanan yang belum dibentuk secara merata di seluruh wilayah Republik Indonesia serta terdapat beberapa kasus yang wilayah hukum terjadinya tindak pidana perikanan yang diadili di pengadilan negeri sementara di wilayah hukum tersebut sudah terbentuk pengadilan perikanan.

⁴³ Op.cit Gatot Supramono, Hlm. 66.

2. Penyelesaian perkara pada persidangan tindak pidana perikanan juga masih terdapat beberapa kendala seperti jangka waktu yang diberikan lebih singkat, serta majelis hakim dimana hakim pada persidangan tindak pidana perikanan masih sangat terbatas jumlahnya. Tindak pidana perikanan pada saat masih sering dilimpahkan ke peradilan umum dikarenakan tindak pidana perikanan tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana lain yang bukan merupakan kewenangan dari pengadilan perikanan, hal ini mengakibatkan adanya penyelesaian dua kasus dalam satu tindak pidana di dua pengadilan yang berbeda.

B. Saran

Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, sebagai berikut :

1. Seharusnya pembentukan pengadilan perikanan dilakukan secara keseluruhan di wilayah hukum perairan Republik Indonesia. Serta adanya perubahan terkait penegasan yurisdiksi antara dua badan peradilan yaitu pengadilan negeri dan pengadilan perikanan agar tidak ada lagi kasus perikanan yang diadili di pengadilan negeri maupun di pengadilan perikanan terkait penanganan tindak pidana perikanan.
2. Jangka waktu yang diberikan kepada aparaturnya penegak hukum dalam penyelesaian tindak pidana perikanan serta sarana dan prasarana dalam penegakan hukum dapat disesuaikan kembali agar semua pihak yang bekerja dalam menegakkan hukum dibidang perikanan dapat bekerja maksimal dan lebih teliti didasarkan dengan pengetahuan dan kemampuan yang cukup dibidang perikanan. Agar penegakan hukum terhadap sektor perikanan di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan ketentuan sebagaimana

yang seharusnya dilaksanakan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alimuddin dan, Supriadi, 2011, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2013, *"Pengadilan Khusus," in Putih Hitam Pengadilan Khusus* Jakarta: Komisi Yudisial RI.
- Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Putra Bardin, Jakarta: 1996.
- Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, .,
- Baringbing, RE, 2001, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Kaligis, OC, 2006, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, PT. Alumni, Bandung.
- Kansil, C.S.T, 1993, *Pengantar Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Meilany dan Weni Rahayu, 2012, *Ensiklopedi Bahasa Indonesia 1*, PT. Mediantara Semesta, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- ;ppMuladi, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Citra Baru, Jakarta.

- Rasyat, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah : Persiapan Bagi Peneliti*, Universitas Riau Press, Pekanbaru.
- Sabuan, Ansorie, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta.
- Sudarsono, 2004, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Gosita, Arief, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Tribawono, Djokro, 2002, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

B. Jurnal/ Skripsi/ Kamus

- John N. Gallo, "Effective Law-Enforcement Techniques For Reducing Crime". *Journal Of Criminal Law and Criminology*, Northwestern University School Of Law, 88 J. Crim. L. & Criminology 1475, Summer 1998.
- Darmini Rosa, "Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara di Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III, 2009.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang

Pengadilan Perikanan, (Jakarta, 2009).

Skripsi Muh.Faizal Al-Fitrah Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perikanan Dalam Hubungannya Dengan Perizinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 907/Pid.B/2015/Pn.Mks).

C. Perundang-Undangan

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

D. Website

<http://walangkopo99.blogspot.com/2012/06/pengertian-pemeriksaan.html?m=1>
diakses, 03 Maret 2019, Jam 13.40 WIB.

<http://www.pengertianahli.com>,
diakses, 04 Maret 2019, Jam 15.00 WIB.

kkp.go.id

<https://kkp.go.id/artikel/11774-kkp-catat-kinerja-positif-di-semester-pertama-2019>